

SMERU
SMERU

PROCEEDINGS KONPERENSI

Proceedings

Konperensi SMERU: *Pemantauan Dampak Sosial Krisis: Pelajaran Tahun 1999*

Temuan, pandangan dan interpretasi dalam laporan ini digali oleh masing-masing individu Tim SMERU dan tidak berhubungan atau mewakili Group Bank Dunia maupun lembaga-lembaga yang mendanai kegiatan dan pelaporan SMERU. Mohon hubungi kami di nomor telepon: 62-21-3909317, 3909363; Faks: 62-21-3907818; Web: www.smeru.or.id atau e mail: smeru@smeru.or.id



Laporan khusus dari Social Monitoring & Early Response Unit (SMERU). Suatu Unit yang didukung oleh Bank Dunia, AusAID, ASEM, dan USAID

7 Desember, 1999

PENDAHULUAN

Lant Pritchett, World Bank-Jakarta

Atas nama SMERU, the Social Monitoring and Early Response Unit, saya mengucapkan selamat datang kepada para peserta Konperensi “Lessons learned in 1999” ini. Kami berbahagia melihat kehadiran begitu banyak rekan-rekan dari berbagai organisasi yang mewakili LSM, kelompok masyarakat madani, lembaga pemerintah dan para donor pada pagi hari ini. Kami berharap kita semua dapat menikmati diskusi dan proses belajar yang aktif serta penuh manfaat.

SMERU didirikan pada bulan Oktober 1998 dengan misi antara lain menyediakan informasi penting, analisis dan melaporkan hal-hal penting yang perlu segera diketahui oleh para stakeholder SMERU mengenai krisis di Indonesia. Hari ini kami berharap kita akan dapat belajar dari satu sama lain – tidak saja dari mereka yang menyampaikan pengalaman-pengalamannya dan berbicara mengenai apa yang mereka lakukan dalam memantau dampak krisis, tetapi juga dari mereka atau organisasi-organisasi yang mempunyai kepedulian terhadap dampak sosial krisis ekonomi yang hingga kini masih berlangsung.

Topik konperensi ini adalah: “Pelajaran yang telah dipetik oleh berbagai kelompok selama tahun 1999 ketika memantau dampak sosial krisis ekonomi di Indonesia” Kita berkumpul bersama tidak untuk menyebarkan-luaskan produk kerja dan hasil kajian SMERU atau laporan penyaji-penyaji lainnya secara satu arah. Sebaliknya, kami ingin menciptakan satu forum terbuka bagi peserta yang berminat membicarakan bersama kegiatan pemantauan yang telah dikerjakan oleh organisasinya, dan pengalaman apa saja yang telah diperoleh selama itu.

Pemantauan langsung memang penting, dan berbagai pendekatan yang telah digunakan oleh berbagai organisasi perlu dibahas bersama sehingga kita dapat menilai pendekatan mana yang paling efektif untuk melakukan perubahan yang diperlukan agar kita dapat meningkatkan kinerja pelaksana program. Pengambilan keputusan dan pelaksanaannya membutuhkan ruang untuk menyerap berbagai masukan dari berbagai *stakeholder* pada tingkat pusat dan lokal.

Pagi ini kita akan mendengar pengalaman lima organisasi yang terlibat dalam pemantauan dampak sosial krisis di Indonesia. Masing-masing akan melakukan presentasi singkat, diikuti dengan waktu 10-15 menit untuk sesi tanya jawab. Siang nanti para peserta kami ajak memilih salah satu dari sejumlah topik berdasarkan kelompok kerja yang akan mengatur diskusinya masing-masing mengenai topik-topik teknis tertentu.

Selain diskusi dan saling berbagi informasi selama presentasi dan sesi kelompok kerja, kami juga memfasilitasi penyebaran informasi. Ruang lobby telah disiapkan bagi

seluruh organisasi peserta yang ingin memberikan informasi dan produk kerjanya agar dapat diketahui oleh peserta lainnya. SMERU juga telah menyediakan sejumlah produk dan laporan-laporannya.

Harapan kami diskusi hari ini dapat memperluas pemahaman kita mengenai upaya-upaya untuk memantau dampak sosial selama krisis sehingga masing-masing peserta memperoleh pemahaman baru atau informasi yang akan meningkatkan kegiatan kerja mereka.

Sebagai penutup, saya ingin mengucapkan terima kasih khusus dari the World Bank kepada para donator pendukung SMERU, yaitu AusAID, USAID, dan ASEM yang telah memberikan dukungannya sehingga konferensi ini terlaksana.

PEMANTAUAN PROGRAM JPS

Sesi 1: Kamala Candrakirana, JARI-JPS

Latar belakang

Proses pemetaan pemantauan program JPS dikembangkan pada awal tahun 1998 sebagai respons terhadap berbagai gambaran keterpurukan bangsa yang dimunculkan oleh para pakar statistik kependudukan. Pemetaan partisipatif ini dimaksudkan sebagai sarana konsultasi langsung dengan masyarakat dan para pengamat sosial di tingkat lokal mengenai krisis yang mereka alami dan pantau di lingkungan sekitarnya. Proses ini diprakarsai oleh sebuah tim *ad hoc* yang terdiri dari aktivis LSM dan peneliti independen dengan pendanaan dari The Ford Foundation.

Tulisan ini disusun sebagai bahan acuan bagi mereka yang sedang menjalankan program-program bantuan kepada para korban krisis maupun bagi mereka yang membutuhkan masukan untuk menentukan posisi mengenai krisis serta mencari cara penyelesaiannya. Tulisan ini juga memaparkan pandangan masyarakat tentang pengalaman mereka dalam menghadapi krisis, mengidentifikasi mereka yang hidupnya dianggap paling terpuruk, serta menawarkan sebuah perspektif baru untuk menempatkan krisis dalam konteks yang lebih luas.

Metodologi

Proses pemetaan dilakukan melalui diskusi-diskusi terarah dengan berbagai kelompok masyarakat atau *focus group discussion* (FGD) baik di tingkat komunitas, kabupaten, maupun propinsi. Konsultasi dengan masyarakat ini difasilitasi oleh para aktivis LSM dan peneliti lokal yang kadang juga merupakan pendamping di komunitas ybs. FGD dimulai di tingkat komunitas, kemudian ditindak-lanjuti dengan FGD di tingkat kabupaten dan propinsi di mana dilakukan proses verifikasi temuan di tingkat komunitas dan pengembangan pemahaman ke tingkat regional.

Semua 27 propinsi di Indonesia terlibat dalam proses pemetaan ini. Konsultasi dengan masyarakat dilakukan secara serentak sekitar bulan Oktober-November 1998. Dua kabupaten per propinsi dipilih untuk mewakili komunitas perkotaan (biasanya kotamadya) dan komunitas perdesaan tertinggal. Proses penentuan kabupaten dan komunitas dilakukan secara partisipatif, melalui konsultasi dengan pemantau-pemantau dan tokoh-tokoh lokal, bahkan kadang-kadang dengan masukan dari pegawai pemerintah lokal. Untuk melengkapi pemahaman tentang masalah-masalah lain di tingkat lokal yang masih berkaitan dengan krisis, dilakukan pemantauan melalui berita atau tulisan di koran-koran daerah selama jangka waktu yang bersamaan dengan jadwal FGD.

Suara siapa yang diwakili? Jumlah FGD yang difasilitasi di tingkat komunitas adalah 393 buah. Sekitar 56% dari kelompok-kelompok tersebut dilakukan di wilayah perdesaan, dan 44% di perkotaan. 37% dari FGD tersebut adalah kelompok ibu-ibu, 45% kelompok laki-laki, dan 18% kelompok campuran laki dan perempuan. Sebanyak 24% dari FGD ini dilaksanakan di wilayah Jawa dan Bali, sisanya di Sumatera (35%), Kalimantan (11%), dan Wilayah Indonesia Timur (30%).

Temuan

Hasil diskusi dengan masyarakat memberikan gambaran tentang krisis dan dampaknya, antara lain yaitu kebanyakan masyarakat disulitkan oleh krisis. Hanya sebagian kecil saja yang merasakan perbaikan tingkat hidup, yaitu 2% dari mereka yang tinggal di perdesaan. Mereka yang dianggap paling terpuruk pada masa krisis adalah:

- Buruh buruh industri dan konstruksi, tani, kapal *trawler*, pengemudi bis;
- Keluarga dengan banyak tanggungan;
- Petani dan nelayan kecil, antara lain petani bahan pangan, peternak ayam, nelayan tradisional;
- Pengusaha sektor informal, antara lain pemilik warung, pedagang kecil, pedagang tekstil dan penjahit, pengusaha transportasi umum dan industri rumah tangga;
- Pegawai negeri tingkat bawah, termasuk guru yang ditempatkan di pelosok-pelosok;
- Keluarga yang terkena bencana alam, misalnya, kebakaran hutan, banjir.

Kesulitan-kesulitan yang dihadapi disebabkan oleh faktor-faktor yang terkait langsung dengan krisis atau faktor-faktor kemiskinan yang sudah lama kita kenal, yaitu:

	Masalah terkait dengan Krisis	Faktor Kemiskinan
Pertanian	Harga pupuk dan obat-obatan naik	Akses terhadap fasilitas transportasi terbatas, ketergantungan pada peminjam uang (rentenir), kegagalan panen.
Perikanan	Harga solar naik	Perairan yang tercemar, pertikaian dengan pihak perusahaan mengenai area tangkapan, akses terbatas karena operasi kapal.
Perkebunan	Kenaikan eksponensial harga pupuk ketika tanaman belum mulai berproduksi; menjadi korban penjarahan besar-besaran.	
Industri	Harga bahan mentah meningkat, permintaan pasar menurun, dan proyek-proyek di bidang konstruksi berhenti.	

Walaupun kebanyakan masyarakat sama-sama merasa hidupnya memburuk, pengalaman masing-masing dalam masa krisis tidak selalu sama. Turunnya penghasilan bersih lebih banyak dirasakan oleh komunitas di Jawa, Bali, dan di wilayah perkotaan. Sementara kesulitan dalam mengakses barang-barang sembako dan obat-obatan lebih dirasakan di luar Jawa dan di wilayah perdesaan.

Dampak sosial terasa baik di perkotaan maupun perdesaan, tetapi bentuknya berbeda-beda. Anak terlantar dan konflik dalam rumah tangga lebih merupakan gejala di perkotaan, sedangkan peningkatan kriminalitas lebih merupakan gejala perdesaan. Baik keluarga-keluarga di kota maupun di desa sama-sama mengalami kesulitan untuk mempertahankan anak-anaknya agar tetap sekolah, tetapi hal ini lebih dirasakan di kota daripada di desa.

Kriminalitas di perdesaan umumnya dalam bentuk penjarahan komoditi pertanian yang bernilai tinggi di pasaran, misalnya kopi, kakao, udang. Sasaran penjarahan bukan hanya lahan milik swasta tapi juga milik pemerintah, termasuk di pusat penelitian pertanian. Penyerangan gudang-gudang beras dan truk-truk yang sedang mengangkut hasil-hasil kebun juga terjadi, selain pencurian kayu (jati, mahoni) dari lokasi-lokasi kehutanan. Kejadian-kejadian seperti ini banyak dilaporkan di Jawa dan Sumatera. Ungkapan ketidakpuasan masyarakat secara terbuka juga merupakan bagian dari pengalaman krisis. Rakyat melancarkan protes-protes menentang penyalahgunaan dana pembangunan oleh kepala desa dan pegawai pemerintah yang KKN, sengketa tanah yang tak kunjung selesai antara rakyat dan perusahaan, upah yang rendah atau tidak adanya pesangon bagi yang mengalami PHK, pungutan sekolah yang berlebihan, maupun penentuan kebijakan secara sentralistik. Protes-protes semacam ini muncul dari Aceh sampai ke Irian.

Kaum perempuan ternyata lebih peka terhadap dampak krisis, lebih optimis mengenai peluang mendapatkan sumber penghasilan baru, tetapi semakin kurang aktif berorganisasi dibandingkan kaum lelaki. Berbagai bentuk kegiatan bersama masyarakat (misalnya, lumbung desa dan gotong royong) belum dimanfaatkan untuk menghadapi dampak krisis.

Program-program Jaring Pengaman Sosial (JPS) dari pemerintah sudah menjadi sorotan kritis masyarakat bahkan pada tahap-tahap awal pelaksanaannya. Kritik yang dilontarkan menyangkut tidak sampainya bantuan ke tangan rakyat miskin, kebocoran dan praktek korupsi, langkanya informasi dan tidak adanya koordinasi, pelaksanaan teknis yang bermasalah, dan ketidakcocokan bantuan dengan kebutuhan masyarakat. Masalah-masalah ini banyak dilaporkan di luar Jawa.

Kesimpulan

Krisis ini menunjukkan betapa seriusnya permasalahan kemiskinan struktural di negara ini. Ini adalah masalah lama yang masih belum terpecahkan juga, kendati program pengentasan kemiskinan telah bertahun-tahun diselenggarakan. Krisis serta dampaknya yang meluas merupakan sebuah gejala penyakit lama, bukan akar permasalahan.

Karakter utama dari krisis yang dialami di Indonesia adalah bahwa ia bersifat multi dimensional. Krisis ini tidak hanya mengenai anjloknya penghasilan rakyat banyak, tetapi juga menyangkut sulitnya akses ke kebutuhan-kebutuhan dasar. Krisis ini bukan saja mempunyai dimensi ekonomi, tetapi juga dimensi sosial dan politik.

Program-program JPS yang ada, yang ditopang oleh hutang baru, tidak mampu menyelesaikan akar permasalahan yang ikut berkontribusi terhadap terjadinya krisis dan rentannya bangsa Indonesia terhadap dampak krisis. Program-program tersebut hanya patut didukung sebagai langkah darurat jangka pendek dan hanya apabila sungguh-sungguh bermanfaat bagi kebanyakan rakyat miskin.

Implikasi perubahan. Diperlukan sebuah agenda anti-kemiskinan yang mampu mendobrak belenggu struktural yang selama ini terus memarjinalkan kaum miskin yang mencakup:

- mengembalikan kepastian hukum (*rule of law*), reformasi birokrasi pemerintahan menuju 'pemerintahan yang baik' (*good governance*) dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pertanggung-jawaban negara;
- meruntuhkan sentralisasi kekuasaan dan hirarki informasi melalui sebuah agenda desentralisasi pemerintahan, desentralisasi pendidikan dan penguatan masyarakat sipil di daerah;
- perluasan ruang gerak dan kepastian hukum bagi pengorganisasian masyarakat (serikat, asosiasi, LSM, federasi, dsb.);
- mengembangkan iklim dan lingkungan usaha yang menguntungkan usaha kecil, termasuk adanya kepastian hukum dan aturan main yang jelas; dan
- jaminan bagi kebhinekaan (pluralisme) jati diri sosial dan budaya masyarakat.

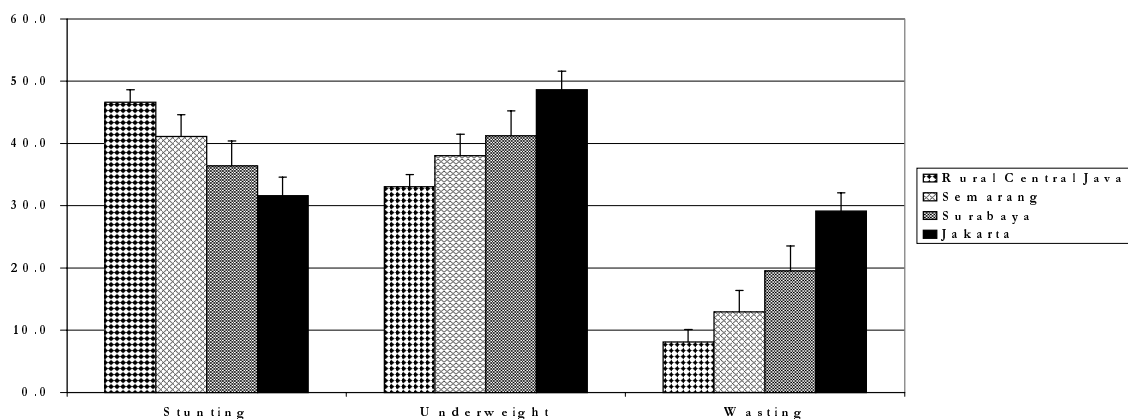
SELAMATKAN ANAK INDONESIA DARI ANCAMAN GENERASI YANG HILANG

Sesi 2: Roy Tjiong, Helen Keller International

Latar Belakang

Sistem surveillans yang dikembangkan Depkes RI dan Helen Keller International menegaskan bahwa telah terjadi penurunan konsumsi zat gizi mikro secara menyeluruh. Namun dampak terberat justru dijumpai di daerah kumuh perkotaan, di mana fasilitas umum sangat minim. Ditambah dengan mandegnya sektor riil, posisi ekonomi mereka berada pada titik terendah. Hal ini diperburuk dengan keadaan bahwa mereka tidak memiliki akses terhadap sumber pangan dan pelayanan kesehatan. Fasilitas umum tidak dikembangkan bagi pendatang haram (sektor non-formal). Kalaupun tersedia, umumnya fasilitas tersebut terletak di pinggir daerah pemukiman kumuh. Untuk memperoleh air bersih saja mereka harus membeli, dan hampir dapat dipastikan lebih mahal dari harga air PDAM.

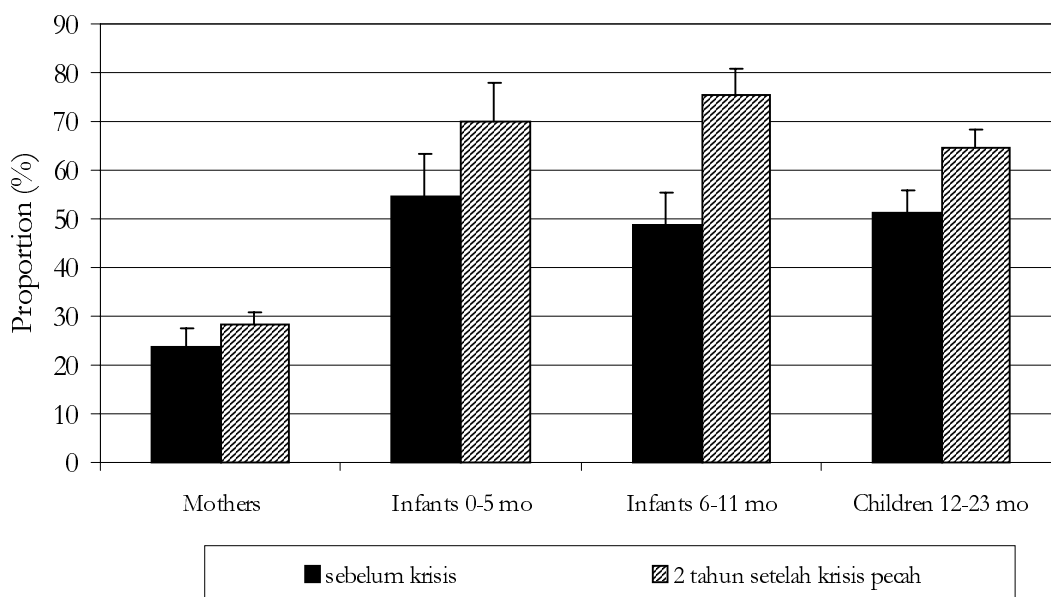
Berdasarkan studi pada anak-anak bawah lima tahun (balita), rata-rata prevalensi *underweight* ($BB/U < -2 Z \text{ score}$) dan *stunting* ($TB/U < -2 Z \text{ score}$) di Indonesia sebelum terjadinya krisis adalah 35%, sedangkan prevalensi *wasting* ($BB/TB < -2 Z \text{ score}$) pada keadaan normal (*non-emergency*) adalah <5%. Kombinasi kekurangan zat gizi makro dan penyakit infeksi (dampak langsung dari kekurangan zat gizi mikro) dapat dilihat pada timbulnya marasmus yang saat ini secara gencar dilaporkan melalui media massa. Grafik 1 berikut ini memperlihatkan bahwa situasi di daerah kumuh perkotaan sudah sangat parah. Di DKI Jakarta bahkan hampir 30% anak bawah dua tahun (baduta) sudah jatuh pada kategori *wasting* (kurang gizi akut).



Grafik 1. Gambaran status gizi makro (KEP) di beberapa daerah kumuh perkotaan di tiga kota besar dibandingkan dengan daerah perdesaan Jawa Tengah pada periode Januari-Maret 1999.

Data bulan Januari-Maret 1999 memperlihatkan bahwa terdapat korelasi positif antara persentase keterpurukan dengan persentase urbanisasi, yang nampak tegas pada data *wasting* yang mendekati 30% (ambang batas kondisi kritis adalah 15% - WHO Expert Committee on Physical Status Interpretation of Anthropometry, Geneva 1993: 28). Namun status gizi anak-anak di daerah kumuh perkotaan di Jakarta pada masa pra-krisis lebih baik dibanding anak-anak di Surabaya, Semarang dan daerah perdesaan Jawa Tengah yang sudah masuk dalam kategori *stunting*.

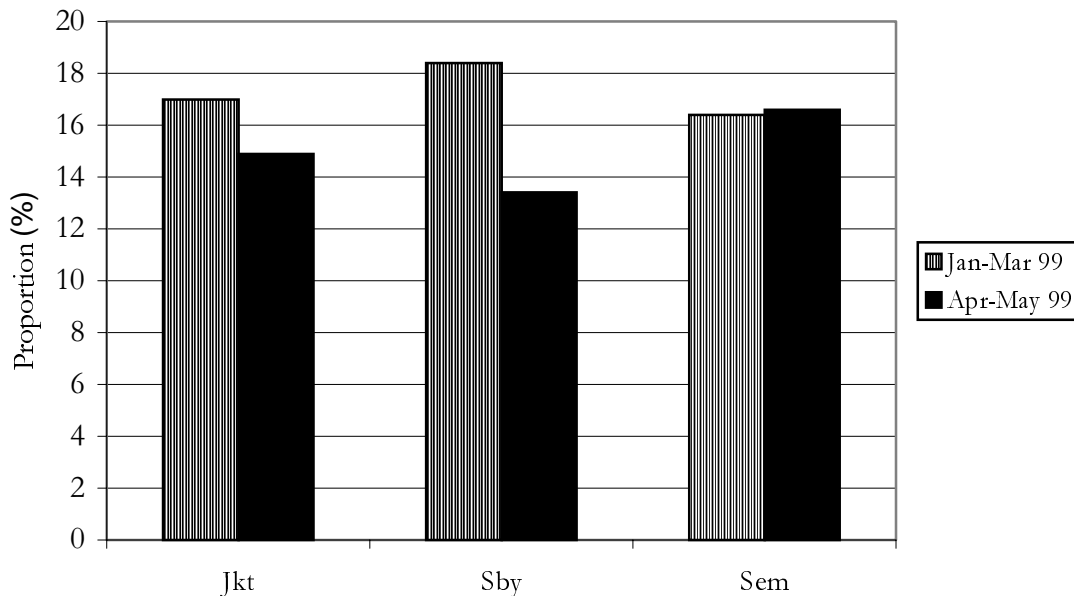
Dampak langsung dari keterpurukan perekonomian pada konsumsi rumah tangga adalah penurunan konsumsi sumber hewani dan makanan yang difortifikasi, yang merupakan sumber utama zat gizi mikro. Hal ini tercermin pada peningkatan anemia zat gizi besi pada balita dan ibu, dan peningkatan prevalensi anemia yang paling tajam terjadi pada usia 6-11 bulan (kelompok usia yang paling rentan, yaitu ketika menjalani transisi dari a.s.i. ke makanan semi-padat). Pada masa lampau para ahli gizi terperangkap pada mitos kekurangan protein (Kurang Energi Protein), namun setelah World Summit for the Children 1990, peranan zat gizi mikro (zat besi, vitamin A, dan iodium) mendapat perhatian yang layak. Temuan mutakhir memperlihatkan bahwa sumber protein hewani adalah sumber zat gizi mikro yang terbaik dan paling berkualitas.



Grafik 2. Prevalensi anemia (kekurangan zat gizi besi) pada Ibu dan Balita sebelum krisis (Juni '96) dan dua tahun sesudah krisis (Juni '98)

Data anemia merupakan proxy-indikator dari kurangnya konsumsi zat gizi mikro, dan dapat ditengarai bahwa kekurangan zat gizi mikro sudah mencapai derajat kritis. Searah dengan status gizinya, anak-anak di daerah kumuh perkotaan mengalami kondisi anemia paling parah, apalagi lingkungan dan fasilitas sanitasi umum mereka jauh dari bersih dan sehat, ditambah derajat pencemaran lingkungan justru paling

tinggi. Akibatnya, derajat kesakitan mereka berlipat kali dibandingkan dengan anak-anak sebaya yang tinggal di perdesaan dan di daerah elite perkotaan.



Grafik 3. Prevalensi IMT rendah di kalangan ibu tidak hamil di daerah kumuh perkotaan

Grafik 3 memperlihatkan betapa buruknya status gizi ibu tidak hamil di daerah kumuh perkotaan, di mana IMT (Indeks Massa Tubuh) adalah BB (Berat Badan) dibagi luas tubuh (TB kwadrat). Keadaan yang gawat ini dicerminkan oleh $IMT < 18,5 \text{ kg/m}^2$. Ambang batas masalah kesehatan masyarakat adalah jika $IMT < 18,5 \text{ kg/m}^2$ lebih atau sama dengan 20%.

Di samping anak-anak, kelompok rentan lainnya adalah kelompok perempuan, terutama kaum ibu karena mereka harus menanggung beban ganda di tengah krisis. Kelompok perempuan ini terpaksa harus bekerja di sektor non-formal ketika suami mereka di PHK. Pada saat yang sama mereka sangat sadar bahwa anak-anak mereka perlu dilindungi dari dampak krisis, sehingga mereka cenderung mengkorbankan porsi mereka demi anak dan suami mereka. Sementara itu yang diutamakan dalam program JPS-BK adalah melindungi perempuan hamil atau menyusui.

Malangnya, pengorbanan kelompok perempuan tidak diimbangi oleh suami-suami yang justru pengeluaran mereka untuk membeli rokok secara nisbi meningkat selama situasi krisis. Pengeluaran rumah tangga untuk rokok pada kelompok ekonomi lemah sekitar dua kali lipat dibandingkan dengan pengeluaran untuk sumber protein hewani.

KRISIS DAN BURUH PABRIK: DAMPAK DAN ISU GENDER¹

Sesi 3: Medelina K. Hendytio, CSIS-AKATIGA

Latar Belakang

Hingga pertengahan tahun 1998, krisis ekonomi di Indonesia yang telah berlangsung lebih dari setahun belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Dampak dari krisis telah menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat terutama di bidang ketenagakerjaan. Berbagai studi menyebutkan bahwa telah terjadi gelombang pemutusan hubungan kerja maupun penutupan berbagai perusahaan sebagai akibat dari keadaan ekonomi yang memburuk .

Data statistik menunjukkan bahwa dampak dari krisis lebih memukul pekerja laki-laki dibanding dengan pekerja perempuan. Hal ini didasarkan pada angka pengangguran laki-laki selama tahun 1997-1998 yang lebih tinggi dibandingkan dengan angka pengangguran perempuan, yaitu 26.6% untuk laki-laki dan 13.4% untuk perempuan. Data Sakernas juga mendukung pernyataan di atas, bahwa peningkatan jumlah perempuan yang bekerja juga lebih tinggi dibanding dengan peningkatan jumlah laki-laki yang bekerja. Wanita yang bekerja meningkat dari 1.8% per tahun sebelum krisis menjadi 4.2% selama tahun 1997-1998. Sebaliknya pertumbuhan jumlah laki-laki yang bekerja justru menurun dari 2.2% per tahun sebelum krisis menjadi hanya 1.7% selama tahun 1997-1998. Akan tetapi, data-data ini harus diinterpretasikan secara hati-hati sebab sangat sulit untuk memberikan penilaian normatif apakah pekerja perempuan memperoleh manfaat dari adanya krisis.

Sejumlah industri manufaktur yang berorientasi ekspor dan didominasi oleh pekerja perempuan seperti industri tekstil, garmen dan sepatu juga terpukul akibat sulitnya memperoleh bahan baku dan menurunnya permintaan. Akibatnya, banyak pekerja perempuan diberhentikan, dirumahkan, atau masih tetap bekerja akan tetapi dengan penghasilan yang semakin tidak mencukupi karena tingkat inflasi yang tinggi. ILO (1998) menyatakan bahwa hanya pada industri tekstil dan garmen saja sebanyak 240.000 wanita kehilangan pekerjaan. Data lain menunjukkan pemutusan hubungan kerja justru menimpa sebagian besar pekerja perempuan (48% pekerja wanita terkena PHK padahal jumlah mereka hanya 38% dari keseluruhan tenaga kerja). Disamping itu, beban pekerja perempuan yang telah menikah yang terkena dampak krisis menjadi semakin berat, sebab mereka tidak hanya menghadapi kondisi kerja yang buruk, tetapi juga harus menanggung beban mengelola rumah tangga yang semakin sulit akibat merosotnya penghasilan keluarga.

¹ Rangkuman dari laporan akhir penelitian yang ditulis oleh Indrasari Tjandraningsih, Medelina K. Hendytio dan Melody Kemp. Penelitian lapangan dilaksanakan oleh tim AKATIGA.

Tujuan Studi

Studi ini dilakukan untuk memperoleh gambaran lebih lengkap tentang dampak krisis dan isu gender, terutama pada pekerja industri tekstil, garmen, sepatu, elektronik dan pengolahan ikan. Studi ini dimaksudkan untuk memberi masukan kepada perumus kebijakan agar program-program yang dirancang untuk mengendalikan dampak krisis dapat memberikan manfaat yang adil baik bagi pekerja laki-laki maupun pekerja perempuan. Kurangnya informasi tentang adanya perbedaan tentang dampak krisis terhadap laki-laki dan perempuan akan melahirkan program-program pengendalian dampak yang bias laki-laki. Studi ini juga dimaksudkan untuk melihat perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan pekerja laki-laki dan perempuan setelah terkena dampak krisis, khususnya yang mengalami pemutusan hubungan kerja, termasuk strategi dan penyesuaian yang dilakukan baik oleh mereka yang masih bekerja maupun yang terkena PHK agar dapat bertahan. Akhirnya studi ini juga dimaksudkan untuk menggali informasi tentang bentuk intervensi dan program-program yang diharapkan oleh mereka yang terkena dampak, agar upaya-upaya pengendalian dampak krisis dapat mengena sasaran dan memenuhi kebutuhan.

Metodologi

Data dikumpulkan dengan menggunakan kombinasi pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif berupa survei dengan menggunakan daftar pertanyaan (questionnaire) yang diajukan kepada 403 pekerja laki-laki dan perempuan yang bekerja di industri tekstil, garmen, sepatu, elektronik dan pengolahan makanan. Sedangkan pendekatan kualitatif berupa wawancara mendalam (*in-depth interview*), Focus Group Discussion (FGD) dan metode partisipasi (lihat Tabel 1 dan Tabel 2). Lokasi penelitian adalah Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi serta Ujung Pandang (Sulawesi Selatan).

Sebelum dirangkum ke dalam sebuah laporan akhir, studi ini mempunyai empat laporan yang ditulis secara terpisah berdasarkan fokus bahasan tertentu, yaitu: “Intervention and Crisis Programs” dan “Management Strategies in Coping with the Crisis”, oleh Indrasari Tjandraningsih, “Workers Coping Strategies: Ways to Survive”, oleh Madelina K. Hendytio, serta “Options for Action Arising from the Research into Gender Dimensions of Unemployment in Indonesia”, ditulis oleh Melody Kemp.

Pekerjaan		Jenis kelamin dan umur			Pendidikan																
Industri	%		%	Rata-rata usia	Tingkat	%															
Pengolahan ikan	17,4	Peremp.	51,4	25	< TK	0,5															
Penggilingan	9,4	Laki-laki	48,6	27	SD	27,0															
Rajut	12,4	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Status Pekerjaan berdasarkan jenis kelamin</th> </tr> <tr> <th></th> <th>L %</th> <th>P %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tetap</td> <td>81,2</td> <td>67,9</td> </tr> <tr> <td>Tidak tetap</td> <td>7,2</td> <td>23,5</td> </tr> <tr> <td>Lain-lain</td> <td>11,6</td> <td>8,7</td> </tr> </tbody> </table>					Status Pekerjaan berdasarkan jenis kelamin				L %	P %	Tetap	81,2	67,9	Tidak tetap	7,2	23,5	Lain-lain	11,6	8,7
Status Pekerjaan berdasarkan jenis kelamin																					
	L %						P %														
Tetap	81,2						67,9														
Tidak tetap	7,2						23,5														
Lain-lain	11,6						8,7														
Tenun	9,9																				
Pakaian	9,9																				
Sepatu olah-raga	12,4																				
Sepatu sehari-hari	7,4																				
Barang elektronik	9,9																				
Komponen elektronik	11,2																				
Seluruh industri	99,9																				
Status perkawinan		Lama bekerja																			
Wanita lajang	65,2	< 1 tahun	0,3	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Pendidikan</th> </tr> <tr> <th>Tingkat</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>< TK</td> <td>0,5</td> </tr> <tr> <td>SD</td> <td>27,0</td> </tr> <tr> <td>SLTP</td> <td>31,5</td> </tr> <tr> <td>SMU</td> <td>34,0</td> </tr> <tr> <td>Lebih tinggi dari SMU</td> <td>3,0</td> </tr> </tbody> </table>		Pendidikan		Tingkat	%	< TK	0,5	SD	27,0	SLTP	31,5	SMU	34,0	Lebih tinggi dari SMU	3,0		
Pendidikan																					
Tingkat	%																				
< TK	0,5																				
SD	27,0																				
SLTP	31,5																				
SMU	34,0																				
Lebih tinggi dari SMU	3,0																				
Wanita menikah	30,4	1 – 3 tahun	35,7																		
Pria lajang	53,6	4 – 7 tahun	41,3																		
Pria menikah	45,6	> 7 tahun	22,7																		
Berceraai atau janda/duda	3,2																				

Sumber : Tjandraningsih,I, “Pengangguran Buruh Pabrik: Dampak dan Isu Gender”, AKATIGA, Bandung (akan diterbitkan).

Tabel 1. Karakteristik responden survei kuantitatif (N=403)

Focus Group Discussion (FGD)		Wawancara mendalam	Metode partisipatif
Jumlah kelompok	12	-	1
Jumlah peserta	100	66	15
Jenis kelamin	P : 53 L : 47	P : 40 L : 26	Semua perempuan
Status kerja	Bekerja : 35 Tidak-bekerja : 65	Bekerja : 49 Tidak bekerja : 17	Semua 15 tidak bekerja
Lokasi	Semua	Semua	Bandung
Sektor	Semua	Semua	Tekstil, Sepatu
Pendidikan	SD – SMU	SD - SMU	SD – SLTP
Lama bekerja	2 – 8 tahun	2 – 8 tahun	-
Lama menganggur	1 – 8 bulan	1 – 8 bulan	1 – 8 bulan
Status perkawinan	Campuran	Campuran	Campuran

Catatan: Buruh yang bekerja diambil dari responden survei kuantitatif.

Tabel 2. Distribusi responden survei kualitatif (N=181)

Temuan-temuan Utama

1. Strategi manajemen dalam menghadapi krisis

Hasil wawancara mendalam terhadap 80 responden yang mewakili perusahaan menyimpulkan bahwa disamping banyak perusahaan mengalami kesulitan di masa krisis, ada beberapa perusahaan tekstil dan garmen di Majalaya dan Surabaya yang tetap bertahan, bahkan mampu mengembangkan perusahaan. Perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan makanan (pengalengan ikan) di Sulawesi Selatan mengalami kesulitan. Pemutusan hubungan kerja hanyalah salah satu bentuk strategi perusahaan untuk bertahan. Perusahaan mempunyai beberapa alternatif strategi dalam menghadapi krisis, tergantung pada tingkat ketahanan perusahaan, antara lain:

a. Rasionalisasi

Upaya rasionalisasi antara lain adalah pengurangan jam kerja, penutupan sementara perusahaan dengan memberikan uang tunggu kepada pekerja, atau pemutusan hubungan kerja. Hasil survei menunjukkan bahwa 20% responden menyatakan bahwa di perusahaan tempat mereka bekerja telah terjadi pemutusan hubungan kerja. Jumlah pekerja yang diberhentikan berkisar antara 10%-75% dari seluruh pekerja yang ada. Pemutusan hubungan kerja biasanya dilakukan secara bertahap. Alasan yang dikemukakan perusahaan adalah tidak adanya bahan baku, menurunnya pesanan, atau untuk meningkatkan efisiensi perusahaan. Dalam kasus lain, PHK terjadi karena perusahaan telah bangkrut, sehingga perusahaan terpaksa melakukan PHK massal. Akan tetapi ada pula PHK yang sebenarnya ditujukan untuk pekerja yang terlalu kritis (aktivis).

b. Merekrut pekerja perempuan yang masih muda

Hasil wawancara mendalam dengan pihak manajemen dan pekerja menunjukkan kecenderungan perusahaan untuk memberhentikan pekerja dengan alasan efisiensi, kemudian merekrut kembali perempuan usia muda sebagai tenaga kerja untuk memperoleh tingkat produktivitas yang optimum. Pekerja perempuan yang masih muda biasanya dianggap penurut dan tidak dibebani oleh urusan-urusan rumah tangga.

c. Penggantian status pekerjaan

Dalam studi ini ditemukan bahwa perusahaan garmen skala menengah di Jakarta dan perusahaan sepatu di Surabaya bertahan dengan cara mengandalkan pekerja lepas. Artinya, pekerja dikontrak untuk jangka pendek dan kontrak tersebut dapat diputus atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Selain itu pekerja hanya dibayar sesuai dengan jumlah pekerjaan yang diselesaikan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya fluktuasi produksi. Perusahaan tidak perlu membayar pekerjanya jika tidak mendapat pesanan. Dalam hal ini perusahaan juga tidak terikat dengan kewajiban memberikan tunjangan-tunjangan lain seperti Tunjangan Hari Raya (THR), tunjangan melahirkan, ataupun pesangon jika memberhentikan pekerjanya. Strategi ini memberi fleksibilitas pada perusahaan dalam memanfaatkan pekerjanya.

d. Bekerja di luar pabrik

Strategi lain yang dilakukan perusahaan untuk bertahan semasa krisis adalah dengan memberikan pekerja pekerjaan untuk dikerjakan di rumah masing-masing. Dengan cara ini perusahaan dapat menghemat biaya tetap maupun biaya produksi, disamping memindahkan resiko pekerjaan ke rumah pekerja. Bagi sebagian pekerja perempuan, terutama yang telah menikah, hubungan kerja semacam ini dianggap menguntungkan, karena disamping bekerja mereka tetap dapat melakukan kegiatan rumah tangganya. Strategi manajemen yang diterapkan semasa krisis ini telah menempatkan pekerja pada posisi yang sangat lemah. Dalam keadaan ini Serikat Pekerja sebagai organisasi yang seharusnya memperjuangkan kepentingan pekerja ternyata tidak berfungsi secara optimal.

2. Kehidupan Pekerja Semasa Krisis

Krisis memberikan dampak yang berbeda terhadap pekerja menurut status pekerjaan maupun menurut gender. Melalui survei kuantitatif dan FGD diketahui bahwa dampak krisis menurut responden adalah pengangguran, pendapatan berkurang atau hilang, dan standard hidup menurun. Bagi mereka yang masih bekerja, studi ini menunjukkan bahwa kondisi kerja mereka tidak banyak berubah selama krisis (lihat Tabel 3). Secara umum pendapatan mereka justru meningkat, dari Rp. 163.000 sebelum krisis menjadi Rp. 189.000. Sebanyak 82% responden menyatakan bahwa jam kerja mereka tidak berubah, bahkan 51% menyatakan bahwa mereka masih bekerja lembur. Hal ini dapat dijelaskan melalui dua hal. Pertama, bahwa sampel perusahaan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang berhasil bertahan selama masa krisis dan secara kontinyu tetap berproduksi. Kedua, survei dilakukan pada bulan November – Desember yang adalah "*peak season*" bagi industri tekstil, garmen dan sepatu.

Meskipun mengalami kenaikan pendapatan, hal ini tidak banyak berarti karena tingkat inflasi sudah mencapai 90%. Pada tingkat inflasi tinggi tersebut pengeluaran untuk makanan menjadi sangat meningkat. Untuk menyeimbangkan antara pendapatan dan pengeluaran para pekerja melakukan penyesuaian-penyesuaian dengan cara mengurangi frekuensi makan, kualitas makanan, dan membeli barang-barang kebutuhan dengan kualitas yang lebih rendah. Di samping itu mereka juga menentukan prioritas pengeluaran. Makan dan pendidikan menjadi prioritas utama, sedangkan kesehatan menempati prioritas sama dengan kebutuhan yang lain seperti membayar listrik, membeli sabun dan lain sebagainya.

Pendapatan pekerja sebelum dan selama krisis (rata-rata perbulan dalam Rp.)			Pengeluaran sebelum dan selama krisis (rata-rata perbulan dalam Rp.)		
	Sebelum	Selama		Sebelum	Selama
Upah dasar	163.000	189.000	Makanan	160.000	230.000
Upah lembur	70.000	72.000	Rumah	29.000	38.000
Transpor	26.000	35.000	Transpor	26.000	21.000
Bonus	32.500	38.000	Pendidikan	30.000	34.000
			Pakaian	19.000	25.000
			Lain-lain	24.000	29.000
Jumlah	288.500	335.000	Jumlah	278.000	477.000
Perubahan jam kerja/lembur (Sebelum dan selama krisis)			Pengurangan tenaga kerja		
	Lembur	Jam kerja		Lebih banyak perempuan yang di PHK ?	Terjadi PHK besar-besaran ?
Meningkat	-	8%	Ya	49%	22%
Stabil	51%	82%	Tidak	21%	73%
Berkurang	29%	10%	Tidak tahu	-	5%
Tidak pernah	20%	-	Jumlah P dan L Yang terkena PHK sama	30%	-

Sumber: Survei kuantitatif

Tabel 3. Persepsi pekerja mengenai keadaan yang berubah(N=403)

3. Strategi menghadapi krisis

Responden memilih 3 (tiga) jenis strategi dalam menghadapi krisis, yaitu:

Pertama, pada masa awal krisis, strategi yang digunakan oleh pekerja untuk bertahan hidup adalah selain mengurangi konsumsi dan membeli barang yang berkualitas rendah, mereka menjual barang-barang berharga, menarik tabungan, meminjam uang kepada teman, atau meminta bantuan orang lain (lihat Tabel 4). Selain itu, 65% responden laki-laki dan 73% responden perempuan menyatakan bahwa mereka telah berhenti mengirim uang ke desa yang besarnya berkisar Rp. 75.000 - Rp. 100.000 per bulan. Berhentinya pengiriman uang ini memiliki implikasi terhadap merosotnya tingkat kesejahteraan keluarga di kampung yang tergantung pada pengiriman uang dari kota.

Pendapatan tambahan		Berhenti mengirim uang		Mencari dukungan keluarga	
Sumber	%	Biasanya untuk	%	Status kerja	%
Menjual aset/harta kekayaan	17,8	Makanan	50	Bekerja: - Menerima bantuan - Tidak menerima bantuan	6 94
Menarik tabungan	6,6	Pendidikan	22		
Meminjam uang	10,9	Modal	3		
Bantuan dari lain-lain	24,7	Bersenang-senang	11	Tidak bekerja: - menerima bantuan - tidak menerima sumbangan	35 65
Pekerjaan tambahan	13	Memperbaiki rumah	3		
Tidak ada	26,5	Lain-lain	11		

Sumber: Survei kuantitatif

Tabel 4. Strategi paling umum dalam mengatasi krisis(N=403)

Bagi mereka yang terkena PHK, akibatnya terasa lebih berat. Pekerja yang sudah menikah menggantungkan hidupnya kepada pasangannya, tetapi jika pekerja yang terkena PHK merupakan pencari nafkah tunggal dalam keluarga, maka keluarga akan tergantung pada pinjaman, misalnya berhutang di warung atau rentenir. Sebagian besar pekerja perempuan lajang yang terkena PHK menyatakan bahwa mereka akan pulang ke kampung sebelum uang pesangonnya habis. Sedangkan pekerja laki-laki lajang cenderung bertahan di kota sambil mencari pekerjaan yang lain.

Kedua, ketika krisis terus berlangsung, strategi jangka pendek tidak dapat terus dilanjutkan. Bentuk strategi jangka menengah dan panjang adalah dengan mencari sumber penghasilan, baik untuk mendapatkan penghasilan atau untuk memperoleh tambahan penghasilan (lihat Tabel 5). Karena memperoleh pekerjaan di sektor formal cukup sulit, maka sebagian masuk ke sektor informal. Studi ini menemukan karakter yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam mencari pekerjaan (lihat Tabel 6), yaitu:

- Responden laki-laki cenderung melakukan usaha secara kolektif.
- Dari 108 responden wanita yang diwawancarai, tidak ada satupun yang ikut serta dalam program padat karya.
- Responden wanita yang terkena PHK sangat ingin dapat bekerja kembali di pabrik, sedangkan responden laki-laki lebih ingin memiliki usaha sendiri karena lebih terhormat dan mandiri. Di pabrik mereka merasa memperoleh perlakuan sewenang-wenang dan tidak adil.

Strategi lain yang diambil untuk memperoleh penghasilan adalah dengan melakukan beberapa kegiatan sekaligus dalam waktu yang sama. Dari studi ini juga ditemukan bahwa kegiatan di sektor pertanian merupakan pilihan pekerjaan setelah responden kehilangan pekerjaan di pabrik atau di perusahaan. Temuan ini sangat menonjol di daerah Sulawesi Selatan. Responden yang kehilangan pekerjaan di perusahaan tekstil kemudian bekerja di perkebunan coklat.

Strategi umum	Strategi Laki-laki	Strategi Perempuan	Strategi yang berkeluarga	Strategi yang belum menikah
<ul style="list-style-type: none"> - Mengurangi belanja - Hanya membeli kebutuhan dasar - Membeli barang dgn kualitas lebih rendah - Menarik tabungan - Menghabiskan uang pesangon - Meminjam uang dari rentenir - Mengurangi biaya listrik - Menggunakan sabun cuci untuk semua kebutuhan 	<ul style="list-style-type: none"> - Menjadi pengemudi <i>ojeg</i> - Menjadi nelayan - Menjadi buruh - Mengerjakan pekerjaan pabrik di rumah - Menjual makanan, buah, bahan-bahan. - Memelihara bebek - Mendirikan bisnis kecil: ternak cacing, buka bengkel sepeda motor - Menjadi buruh tani - Menjual rokok - Mengumpulan ikan lele - Buka tempat cukur - Pengumpul sampah - Membuat bata 	<ul style="list-style-type: none"> - Menjual makanan kecil, buah, sayur - Mengerjakan pekerjaan pabrik di rumah - Melayani cuci baju - Menjadi buruh migran - Memetik coklat - Menjadi pembantu rumah tangga 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak begitu mengandalkan bantuan dari keluarga batih - Menjual aset, tanah, perhiasan <p style="text-align: center;">Perempuan menikah yang tidak bekerja</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tergantung pada pendapatan suami - Tidak melakukan apa-apa 	<ul style="list-style-type: none"> - Tergantung bantuan dari keluarga atau teman - Pulang kampung dan mencari pekerjaan di kampung - Menunggu pekerjaan baru di pabrik

Sumber: Wawancara mendalam dan kelompok partisipatori

Tabel 5. Strategi umum dan strategi spesifik dalam menghadapi krisis menurut gender dan status perkawinan (N-181)

Ketiga, responden mungkin menggantungkan diri pada program padat karya. Pengetahuan responden tentang padat karya menunjukkan keseragaman, yaitu program padat karya adalah program pemerintah untuk mengatasi masalah PHK dan pengangguran dengan menyediakan kesempatan kerja sementara seperti pekerjaan pembersihan, penggalian selokan dan saluran, dan pembuatan jalan. Secara umum studi ini menyimpulkan bahwa program padat karya tidak menjangkau buruh PHK meskipun program ini diketahui secara luas di kalangan buruh. Hampir seluruh responden wanita dan sebagian besar responden laki-laki menyatakan bahwa jenis pekerjaan program padat karya yang ditawarkan menyebabkan mereka tidak tertarik untuk ikut program tersebut (lihat Tabel 7). Responden perempuan menyatakan bahwa jenis pekerjaan tidak sesuai untuk perempuan. Menurut responden program padat karya juga bukan merupakan solusi yang tepat karena sifatnya hanya sementara

dan jangka pendek, sedangkan krisis yang mereka alami sangat panjang. Mereka berharap adanya program-program penciptaan lapangan kerja yang bersifat lebih permanen, misalnya melalui pembinaan pendirian usaha kecil.

Pilihan Sektor	50% dari pekerja laki-laki	50% lainnya dari pekerja laki-laki dan semua pekerja perempuan
Sektor formal	Upah rendah Jam kerja panjang Tunjangan kecil Uang pesangon kecil Diperlakukan tidak adil	Lebih aman Pendapatan tetap Status lebih tinggi Keterampilan lebih rendah
Sektor informal	Tidak terikat Pendapatan lebih tinggi Harga diri	Pendapatan rendah Satatus rendah Jam kerja tidak tentu Bekerja lebih keras

Sumber: Wawancara mendalam, FGD, dan kelompok partisipatori

Tabel 6. Penilaian responden sesuai dengan gender dan pilihan sektor (N=181)

Sikap	Laki-laki	Perempuan
Tertarik, tetapi program tidak dilaksanakan di daerah responden	20%	-
Tidak tertarik	70%	-
Tidak sesuai	-	90%
Belum pernah dengar/tidak tahu	10%	10%

Sumber: Wawancara mendalam dan kelompok partisipatori

Tabel 7. Sikap responden terhadap program Padat Karya berdasarkan wawancara mendalam (N=115)

Implikasi Kebijakan

Berikut ini adalah arah kebijakan yang dapat dipertimbangkan untuk memecahkan persoalan-persoalan ketenagakerjaan yang disebabkan oleh krisis.

1. Pengembangan usaha kecil

Pemberian pelatihan dan kredit untuk pendirian usaha kecil perlu dikembangkan untuk mendorong penciptaan lapangan kerja bagi pekerja yang mengalami PHK. Penciptaan lapangan kerja perlu memiliki kepekaan gender, agar baik laki-laki maupun perempuan dapat memperoleh akses yang sama.

2. Sektor informal

Sektor informal telah menjadi katup penyelamat dalam masa krisis. Oleh sebab itu perlu studi lebih lanjut bagi pengembangan dan dukungan terhadap sektor informal agar menjadi sumber pendapatan yang potential bagi mereka yang tergantung pada sektor ini.

3. Perempuan dan Padat Karya

Pengabaian kebutuhan perempuan pada perencanaan program padat karya menjadi indikasi yang jelas adanya asumsi bahwa perempuan adalah "*second bread winner*". Pada saat sama hal ini juga menunjukkan kurangnya pengakuan terhadap partisipasi ekonomi wanita. Oleh sebab itu, untuk selanjutnya perencanaan setiap program perlu mempertimbangkan kebutuhan gender (*gender needs*)

4. Memperkuat Serikat Pekerja

Mengembangkan serikat pekerja yang independen dan mandiri merupakan isu yang sangat penting agar kepentingan pekerja terlindungi baik pada masa krisis maupun pada masa pertumbuhan.

SAWARUNG: SARASEHAN WARGA BANDUNG

KONSORSIUM LSM BERBASIS LUAS & KELOMPOK MASYARAKAT MADANI

Sesi 4-A: Alex Irwan, SMERU

Latar Belakang

Pada akhir tahun 1998 SMERU bersama beberapa mitra LSM telah membentuk Pemantauan Swadaya Masyarakat (PSM) terhadap program Jaring Pengaman Sosial (JPS) di Kotamadya Bandung, Kotamadya Jakarta Utara, dan Kabupaten Lombok Barat. Pada saat pengembangan proyek rintisan tersebut, SMERU harus menanggapi permintaan anggota Konsorsium LSM di Kabupaten Lombok Barat dan suatu kelompok masyarakat madani di Kotamadya Bandung (kemudian dikenal sebagai SAWARUNG), bahwa masyarakat ingin melakukan lebih dari sekedar memantau program pemerintah. Masyarakat ingin menciptakan suatu sistem yang memungkinkan mereka mengendalikan para birokrat pelaksana program-program pemerintah. Mereka juga ingin menyusun suatu mekanisme yang memungkinkan masyarakat berperanserta penuh dalam proses pengambilan keputusan, termasuk dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan masyarakat.

Agar dapat berperanserta penuh, masyarakat perlu didukung oleh data terkini dan jaringan database yang akurat mengenai kondisi lokal, potensi, serta kebutuhan dan masalah pembangunan lokal. Data pada tingkat komunitas yang terbaik adalah data yang dihimpun dan dimutakhirkan oleh masyarakat itu sendiri. Peran SMERU disini adalah memfasilitasi pengembangan Community-based Information Network for Development Planning (COMBINE) atau Jaringan Informasi Berbasis Komunitas untuk Perencanaan Pembangunan yang akan dibentuk oleh berbagai pihak masyarakat yang berkepentingan. Sasarannya adalah agar secara bertahap dapat tercipta 'Pemerintahan Daerah yang Baik' di seluruh Indonesia.

Dasar Pemikiran

COMBINE perlu dikembangkan berdasarkan pemikiran :

- Bila kebijakan otonomi daerah telah diberlakukan pada tahun 2001, pemerintah daerah sudah harus lebih efisien dan mampu bersaing;
- Efisiensi dan berdaya saing hanya dapat dicapai melalui sistem pengelolaan layanan publik yang transparan dan dapat dipertanggung-jawabkan;
- Efisiensi dan berdaya saing menuntut pengembangan sistem pemerintahan yang mempertimbangkan kondisi, kebutuhan serta potensi lokal;

- Identifikasi kondisi dan kebutuhan serta potensi lokal mensyaratkan pengembangan jaringan nasional infrastruktur sosial berciri lokal dalam bentuk Forum Warga yang berbasis luas dan bersifat partisipatif pada tingkat Kelurahan dan Kecamatan, serta adanya Forum Lintas Pelaku pada tingkat Kabupaten atau di kawasan tertentu;
- Forum Warga semacam ini dapat dibentuk berdasarkan lokasi kediaman atau lainnya, misalnya: masyarakat pedagang kaki lima, buruh angkut, pedagang pasar, dsb;
- Jaringan nasional infrastruktur sosial berciri lokal bukanlah suatu proyek, tetapi adalah sekumpulan berbagai lembaga pengembang yang bersifat partisipatif yang dapat digunakan oleh program pemerintah maupun non pemerintah dalam upaya pemberdayaan masyarakat;
- Forum yang melibatkan berbagai pihak dan bersifat partisipatif ini akan memungkinkan masyarakat dan kelompok-kelompok madani mampu mengembangkan sistem informasi 'bottom-up' yang akan menjadi database tentang kebutuhan, potensi dan masalah pengembangan masyarakat;
- Jaringan nasional infrastruktur sosial berciri lokal ini akan memungkinkan masyarakat bertindak sebagai kelompok penekan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, juga untuk mengidentifikasi potensi lokal dalam meningkatkan pendapatan daerah.

Sawarung (Sarasehan Warga Bandung)

Pengalaman SMERU dari tiga proyek pilotnya adalah bahwa pengembangan COMBINE sebaiknya didahului dengan pembentukan suatu konsorsium yang terdiri dari LSM berbasis luas dan kelompok-kelompok masyarakat madani. Kedua unsur ini dapat bertindak sebagai motor penggerak untuk membentuk suatu infrastruktur sosial berciri lokal yang berskala nasional yang berbasis luas dan partisipatif. COMBINE harus dilaksanakan secara desentralisasi oleh pelaku-pelaku pembangunan di daerah, sementara SMERU hanya berperan sebagai fasilitator.

Di Bandung, setelah SMERU memfasilitasi pembentukan Forum warga Kelurahan di Cibangkong, beberapa NGO dan kelompok masyarakat madani mulai mensosialisasikan kebutuhan agar membentuk suatu konsortium berbasis luas. Hasilnya, pada tanggal 27 Juli 1999, SAWARUNG dibentuk oleh 18 LSM dan beberapa kelompok masyarakat madani. Saat ini SAWARUNG sudah mempunyai 25 anggota. Di waktu yang akan datang, pembentukan konsorsium yang sama oleh masyarakat di lokasi-lokasi lainnya akan dapat mengambil pelajaran dari pengalaman SMERU di Bandung. Upaya menciptakan pemerintah yang baik pada tingkat komunitas dalam konteks pelaksanaan COMBINE terletak ditangan konsorsium-konsorsium LSM berbasis luas dan kelompok masyarakat madani seperti SAWARUNG ini.

**Konsorsium LSM berbasis luas dan kelompok masyarakat madani
SAWARUNG di Bandung**

No	Nama LSM dan kelompok masyarakat madani	Jenis kegiatan
1	Asosiasi Konsultan Pembangunan Permukiman Indonesia (AKPPI-Pusat)	Konsultan pembangunan mengenai pengelolaan masyarakat
2	Asosiasi Pemukiman Kooperatif (ASPEK)	Jaringan masyarakat untuk koperasi pemukiman
3	Bandung Institute of Governance Studies (BIGS)	Studi dan analisis pemerintah yang baik
4	Bandung Peduli	Bantuan pangan, pengembangan masyarakat
5	Computer Network Research Group (CNRG) - Institut Teknologi Bandung	Riset mengenai jaringan komputer dan sistem informasi
6	Gerakan Lumbung Kota (GLK)	Gerakan masyarakat kota berbasis di RW
7	Institute of Community Organizer (ICO)	Pelatihan untuk fasilitator, advokasi
8	Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA)	Advokasi untuk petani dan isu-isu pertanian
9	Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (LPER)	Pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pedagang kecil
10	Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPKM) Universitas Parahyangan	Advokasi dan pemberdayaan masyarakat
11	Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) Universitas Pajajaran	Advokasi dan pemberdayaan masyarakat
12	Lembaga Pengembangan Sumberdaya Pedesaan (LPSP)	Pemberdayaan masyarakat pedagang kecil
13	Praksis	Advokasi, pelatihan fasilitator, studi pembangunan
14	Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Jawa Barat	Isu-isu keluarga berencana.
15	Perkumpulan Untuk Peningkatan Usaha Kecil (PUPUK)	Usaha kecil, industri kecil di bidang pertanian
16	Yayasan Akatiga	Penelitian
17	Yayasan Anak Merdeka (YAM)	Advokasi untuk anak jalanan
18	Yayasan Bina Karya	Perumahan untuk pekerja, pendidikan untuk pekerja
19	Yayasan Bumi Swadaya Bhakti (YBSB)	Pendanaan mikro
20	Yayasan Iqbal	Keagamaan dan perdagangan kecil
21	Yayasan Pemberdayaan Masyarakat (YPM) Dynamic	Isu-isu lingkungan
22	Yayasan Pendidikan Alternatif (YPA)	Pendidikan alternatif
23	Yayasan Pengembangan Swadaya masyarakat (PESAT)	Infrastruktur, sanitasi, pengadaan air bersih
24	Yayasan Setia Budi Utama (YASBU)	Lingkungan dan pengadaan air bersih
25	Yayasan Sidikara	Kesehatan, kampanye anti AIDs

SAWARUNG: PENGALAMAN DARI BANDUNG

Sesi 4-B: Andarusman, Forum Warga Kelurahan Cibangkong

Pengantar

SAWARUNG, singkatan dari Sarasehan Warga Bandung, adalah sebuah jaringan kerja sama, tempat saling tukar informasi dan koordinasi antar unsur-unsur kelompok masyarakat madani (*civil society*) yang terdiri dari LSM, asosiasi profesi, media, perguruan tinggi dan gerakan masyarakat di Kota Bandung. Jaringan ini bersifat independen, non-partisan, dan nir-laba. SAWARUNG dibentuk sebagai suatu forum pada bulan April 1999 oleh sekelompok lembaga dari berbagai bidang dan minat yang sama-sama peduli terhadap upaya-upaya untuk memperkuat masyarakat madani dan demi tercapainya penyelenggaraan urusan publik yang baik (*good governance*) di Kota Bandung.

SAWARUNG dibentuk sebagai jawaban atas kebutuhan warga Bandung untuk melakukan koordinasi dan kerjasama demi terwujudnya suatu pemerintahan yang baik pada tingkat lokal (*local good governance*) dengan menerapkan dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi. Untuk itu SAWARUNG berketetapan untuk memperkuat daya dan posisi tawar rakyat dengan memulai dan terus-menerus membangun serta memperkuat jaringan masyarakat madani dan institusi masyarakat. Peran dan fungsinya adalah untuk memperkuat kontrol sosial, terutama yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dalam memberikan pelayanan umum, disamping melakukan kontrol terhadap aktor-aktor pembangunan pada tingkat lokal.

Visi

Visi SAWARUNG adalah mewujudkan suatu tatanan penyelenggaraan urusan publik yang baik di tingkat lokal yang demokratis, transparan, partisipatif serta bertanggung-jawab. Penyelenggaraan urusan publik yang baik pada tingkat lokal ditandai dengan adanya hubungan yang baik antara pemerintah dengan masyarakat dalam hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan publik. Hal ini berarti perencanaan dilakukan secara *bottom up* dengan melibatkan peran serta berbagai unsur masyarakat madani dan komunitas akar rumput, dan terbukti dengan adanya layanan birokrasi yang terkoordinasi, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Misi

Untuk mencapai visi diatas, maka SAWARUNG sebagai suatu forum berupaya untuk meningkatkan posisi tawar masyarakat dengan secara konsisten membangun institusi masyarakat (*public institution building*) kearah yang lebih kuat, sehingga pada saatnya

mampu menjalankan peran sebagai kontrol sosial terhadap lembaga negara. Lebih penting lagi, institusi tersebut mampu menciptakan dan mengembangkan mekanisme untuk menyalurkan aspirasi masyarakat melalui penguatan daya dan kesadaran kritisnya.

Hal-hal yang telah Dicapai

Dominasi pemerintah, birokrasi dan militer telah semakin kuat di hampir seluruh aspek kehidupan nasional. Ini telah memperlemah kedudukan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Pada hakekatnya, hampir semua institusi yang dibentuk pemerintah sampai pada yang paling rendah merupakan perpanjangan tangan dan melanggengkan dominasi pemerintah. Semua institusi tersebut dirancang untuk memperluas dominasi pemerintah lebih jauh. Dominasi secara sistematis ini diperkokoh dengan cara memberlakukan penyeragaman bentuk institusi dari atas ke bawah, dari pusat ke daerah, dan dengan demikian dapat menekan inisiatif dan mematikan institusi lokal yang telah ada.

Dominasi pemerintah mewujudkan dalam tidak adanya kehendak politik pemerintah pusat untuk mengakomodasi otonomi pemerintah. Pada dasarnya, otonomi daerah merupakan prasyarat terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan hal ini telah merupakan amanat statuta negara. Penyerahan otonomi daerah kepada rakyat dan pemerintah di daerah merupakan hak dan kewajiban yang harus segera ditunaikan. Untuk mewujudkan cita-cita luhur tersebut, harus ditempuh upaya untuk menempatkan dan memfungsikan kembali organ-organ politik dan pemerintahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini hanya dapat terwujud bila prinsip-prinsip demokrasi yaitu aspiratif, proaktif, partisipatif, transparansi, kesetaraan dan keterjangkauan dan kebertanggungjawaban diterapkan dan dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan urusan publik.

Tidak diterapkannya prinsip-prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan urusan publik kemudian memunculkan dampak negatif bagi daerah. Akar permasalahannya tidak lepas dari kinerja pemerintah yang rendah. Dampak negatif ini harus segera disikapi sehingga suatu kesadaran baru dapat ditumbuhkan. Meningkatkan kinerja pemerintah dalam penyelenggaraan urusan publik merupakan salah satu cara untuk mencapai prinsip-prinsip demokrasi. Inisiatif dan sikap proaktif SAWARUNG diharapkan akan mampu membangun sinergi bagi munculnya platform *good governance* yang baik di Kota Bandung.

Pengembangan Wacana

Untuk mengembangkan wacana tentang masyarakat madani, SAWARUNG mengadakan diskusi-diskusi terbuka dengan mengundang berbagai pembicara dari dalam dan luar negeri, termasuk:

1. Claus Knoth, peneliti dari Jerman yang bergabung dalam Uni Eropa, mengenai “Perkembangan ekonomi di Cina: Pelajaran yang dapat dipetik”.

2. Joel Rocamora dari Institute for Popular Democracy, Filipina, mengenai “Usaha mewujudkan demokrasi di Filipina dan kemungkinan penerapannya di Indonesia”.
3. Krishna Kumar dari Kerala Sastra Sahitya Parishad, India, mengenai “Perencanaan bottom-up: Kasus People’s Plan Movement di negara bagian Kerala, India”.
4. Sarwono Kusumaatmaja, sekarang Menteri Eksplorasi Laut, mengenai “Dampak positif penerapan otonomi daerah di Indonesia”.
5. Yus Ruslan dari Bina Program, Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat, mengenai “Proyek pembangunan jalan layang Paspati di Kotamadya Bandung”.
6. Rusadi Kantaprawira, pengajar Universitas Padjadjaran, Bandung, mengenai “Partisipasi masyarakat dalam mewujudkan *local good governance*”.

Selain diskusi terbuka, SAWARUNG menyelenggarakan seminar kerjasama dengan Friedrich Naumann-Stiftung (FNSt) mengenai usaha-usaha penguatan institusi lokal, dengan pembicara Vivek Asrani dari Association of Youth for a Better India (AYBI), dan Sunil Alva serta Samantha Saldanha dari PRAJA Foundation, India.

Usaha-usaha untuk mengembangkan wacana tentang masyarakat madani dan *local good governance* tidak hanya dilakukan melalui diskusi dan seminar. SAWARUNG juga telah memberikan beberapa presentasi untuk mempengaruhi pengambil keputusan dalam mengeluarkan kebijakan, misalnya mengenai:

1. Pembangunan jalan layang Paspati
2. Strategi Pengembangan Kota Bandung
3. Pedagog kaki lima di Bandung

Memperkuat Jaringan

SAWARUNG melakukan usaha-usaha aktif untuk mengembangkan dan memperkuat jaringan, termasuk jaringan kedalam (*internal networking*) dan jaringan keluar (*external networking*). Penguatan jaringan kedalam dilakukan dengan membentuk suatu model jaringan yang bersifat *inklusif*, terbuka, serta bersifat transparan. *Internal networking* ini ditujukan untuk memperkuat posisi tawar unsur-unsur masyarakat madani dalam melakukan upaya untuk memperkuat posisi tawar masyarakat.

Penguatan jaringan keluar dilakukan dengan cara membangun aliansi strategis dengan inisiatif-inisiatif serupa SAWARUNG di dalam dan di luar negeri. Aliansi yang telah dilakukan oleh SAWARUNG antara lain dengan Community Involvement in Urban Development (CIUD) di Yogyakarta dan Kerala Sastra Sahitya Parishad (KSSP) di India.

Pengembangan Sumberdaya

Hingga saat ini SAWARUNG telah memiliki 25 anggota yang memiliki berbagai kompetensi dan keahlian, yang secara aktif terus bekerja untuk meningkatkan posisi tawar masyarakat. Untuk menjamin agar kegiatan SAWARUNG berjalan dengan

baik, SAWARUNG ditunjang oleh 3 (tiga) orang staff sekretariat serta menyewa satu rumah untuk ruang sekretariat sebagai titik simpul koordinasi dan informasi.

Lingkup kegiatan

Untuk mencapai visi dan misi diatas, maka kegiatan SAWARUNG terpusat pada kegiatan yang dilaksanakan oleh presidium SAWARUNG dan sekretariatnya, serta kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan oleh anggota-anggota SAWARUNG. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat dikelompokkan sbb:

1. Komunitas, meliputi kelompok penduduk, kelompok kepentingan, dan kelompok profesi
2. Masyarakat madani, termasuk LSM/Ormas, perguruan tinggi, asosiasi profesi, kelompok keagamaan
3. Negara/Pemerintah, termasuk parlemen/partai, birokrasi pusat dan daerah, dan lembaga penegak hukum
4. Dunia usaha, termasuk usaha kecil, menengah dan besar

Semua kegiatan diatas ini dapat dibagi lagi dalam besaran mikro, medium dan makro dimana masing-masing target ditujukan pada hierarkhi yang berbeda, yaitu:

1. Kegiatan micro, dilakukan dalam jangka pendek atau target jangka pendek. Sasarannya adalah individu-individu atau kelompok-kelompok dari masing-masing *stakeholder* sasaran. Usaha-usaha tersebut meliputi: penyebaran informasi, peningkatan kemampuan, dan pengorganisasian.
2. Kegiatan medium, dilakukan dalam jangka menengah atau target jangka menengah. Sasarannya adalah institusi-institusi dari masing-masing *stakeholder* sasaran. Usaha-usaha tersebut meliputi: penguatan lembaga, kerjasama antar lembaga, dan penguatan jaringan.
3. Kegiatan makro, dilakukan dalam jangka panjang atau target jangka panjang. Sasarannya adalah sistem secara keseluruhan. Usaha-usaha meliputi: perencanaan sistem, implementasi, serta pemantauan dan evaluasi.

Rencana ke Depan

Dalam waktu dekat, SAWARUNG akan melakukan beberapa kegiatan, yaitu:

1. Melakukan penyebarluasan informasi, penciptaan saluran-saluran komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah (melalui radio, forum pertemuan dan dialog). Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas warga melalui kemudahan untuk mengakses informasi dan melakukan komunikasi dengan pemerintah.
2. Menyusun proposal *action plan* SAWARUNG. Isi proposal berdasarkan usulan-usulan dari lembaga-lembaga yang tergabung dalam keanggotaan SAWARUNG.

Rencana-rencana ini merupakan langkah awal untuk menjalankan strategi yang dimiliki oleh SAWARUNG untuk mewujudkan visi dan misinya. Strategi tersebut adalah:

1. Penguatan Pranata:

Strategi ini adalah untuk meningkatkan artikulasi dan posisi tawar masyarakat pada tingkat kelurahan, kecamatan dan kotamadya. Penguatan pranata dilakukan melalui:

- Menyusun sistem dan mekanisme pranata yang memungkinkan terbentuknya suatu institusi atau pranata sosial lokal yang akomodatif terhadap kebutuhan dan kepentingan warga;
- Institusionalisasi yang menghendaki keterlibatan dan partisipasi masyarakat;
- Penguatan jaringan untuk memperkuat posisi tawar institusi masyarakat.

2. Penguatan Warga:

Strategi ini dilakukan untuk memungkinkan organisasi memperkuat posisi individu yang otonom, kritis dan egaliter di kalangan anggotanya, warga Bandung, dan setiap pihak pada umumnya. Disadari bahwa tatanan masyarakat madani sangat tergantung pada suara-suara perorangan yang berada di dalamnya. Kesadaran akan hak, kewajiban, wewenang, fungsi, dan peran setiap individu, baik sebagai aparat pemerintah, pelaku swasta, maupun masyarakat, merupakan tumpuan bagi terwujudnya tatanan masyarakat sipil yang demokratis.

FORUM KOMUNIKASI WARGA KAMAL MUARA DAN PEMBERDAYAAN KAUM PEREMPUAN

Sesi 4-C: Nurwahida, Forum Komunikasi Warga Kamal Muara

Pendahuluan

Seperti banyak masyarakat Indonesia lainnya, warga Kelurahan Kamal Muara di Kamal Muara Penjaringan, Jakarta, juga menderita karena adanya krisis ekonomi. Salah satu dari masyarakat setempat yang sangat terkena dampak krisis ekonomi adalah warga RW 01 Kelurahan Kamal Muara yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan tradisional. Penduduk Kelurahan Kamal Muara berjumlah 5234 jiwa, terdiri dari 1036 KK (Nopember 1999). Sebagian besar penduduk tinggal di RW 01 yang berpenduduk 4197 jiwa dari 912 KK. Selama tiga tahun terakhir ini hasil tangkapan nelayan Kamal Muara sangat jauh berkurang. Limbah industri dan limbah domestik telah mencemari perairan di sekitar wilayah tersebut sehingga jumlah ikan dan hasil laut lainnya sudah merosot tajam dalam radius sejauh 3 mil dari garis pantai. Keadaan ini sangat mempengaruhi penghasilan masyarakat setempat.

Untuk membantu masyarakat menanggulangi dampak krisis ekonomi, program JPS mulai dilaksanakan di Kamal Muara pada bulan Maret 1999. Namun bantuan pemerintah tersebut dipandang masih kurang efektif sehingga masyarakat ingin mencari cara yang lebih baik dalam pelaksanaan program tersebut. Digerakkan oleh keinginan tersebut, beberapa tokoh masyarakat yang peduli terhadap kondisi wilayahnya membentuk institusi yang bersifat independen pada tingkat Kelurahan yang disebut FKW (Forum Komunikasi Warga). Fungsi utama Forum ini adalah melakukan pemantauan dan mendorong pemberdayaan masyarakat.

Pembentukan Forum Warga

Forum Komunikasi Warga (FKW) Kamal Muara terbentuk pada bulan April 1999, dan menjadi titik temu bagi anggota masyarakat yang ingin berbagi informasi dan bertukar pendapat mengenai dinamika pengembangan masyarakat di tingkat lokal. Forum ini mengakomodasi berbagai kelompok yang berbeda yang ingin terlibat dalam proses pembangunan. Forum juga berperan penting dalam memantau program-program pemerintah maupun LSM yang dilaksanakan di Muara Kamal melalui berbagai jenis pertemuan forum dan Kelompok Kerja. Dengan demikian posisi tawar masyarakat setempat meningkat.

Disamping melakukan pemantauan, Forum juga mendukung kelompok-kelompok yang selama ini tersisihkan oleh program pembangunan Orde Baru terdahulu. Kelompok-kelompok ini, terutama kaum perempuan dan keluarga miskin, diajak berperanserta dalam kegiatan-kegiatan Forum. Di waktu yang lalu, karena adanya

perbedaan sosial dan ekonomi, keterlibatan mereka dalam proses pembangunan sangat terbatas.

Forum telah dinilai positif oleh sejumlah elemen kunci masyarakat, terbukti dari keterlibatan beberapa kelompok masyarakat Kamal Muara yang selama ini telah bekerja sama dengan Bina Swadaya, suatu LSM pengembang masyarakat.

Dari misi awal yang hanya sebatas melakukan pemantauan, FKW Kamal Muara berkembang lebih jauh dan memiliki misi yang lain, yaitu proses pemberdayaan warga. Maka dibentuklah Jaringan Perempuan Kamal Muara. Proyek awal Jaringan Perempuan ini adalah menyusun dan mengajukan proposal air bersih ke UNESCO.

Pemberdayaan Perempuan

Di wilayah Kelurahan Kamal Muara, peranan kaum perempuan belum mendapat penghargaan. Selama ini mereka hanya menjadi obyek pembangunan, belum menjadi kekuatan yang aktif. FKW yang peduli terhadap perempuan berupaya menghimpun kaum perempuan setempat agar turut serta membangun wilayahnya. Dengan melakukan pemetaan kemiskinan dan pemetaan wilayah, dapat diketahui bahwa kaum perempuan telah terpinggirkan dalam proses pembangunan karena pendekatan pembangunan yang bersifat "*top-down*". Dengan terbentuknya Jaringan Perempuan Kamal Muara kaum perempuan setempat telah menemukan wadah penampung aspirasi mereka dengan menggunakan data yang dihimpun sebagai data base.

Forum Perempuan Kamal Muara adalah salah satu dari berbagai forum-forum warga yang telah mencoba melibatkan masyarakat Kamal Muara dalam masalah-masalah lingkungan dengan cara mendukung kaum perempuan setempat dalam kegiatan-kegiatan lingkungan. Berbagai kegiatan yang hingga saat ini masih berlangsung antara lain: melakukan **pemantauan** program Padat Karya ADRA, program JPS, proyek pembuatan jalan di perkampungan baru RW 01, dan program Padat Karya Perhutanan, melakukan program **pemberdayaan masyarakat**, termasuk pengentasan kemiskinan, pembentukan Jaringan Perempuan, penanaman pohon, dan pembuatan proposal untuk diajukan ke UNESCO.

Kegiatan

Segara setelah FKW Kamal Muara terbentuk, program-program Forum diperkenalkan kepada masyarakat. Forum juga menjadi mitra dari Lurah, LKMD dan instansi pemerintah lainnya, karena untuk mencapai tujuan program kerjasama yang baik dari berbagai pihak sangatlah penting. Saat ini Forum telah melakukan berbagai kegiatan, termasuk mengidentifikasi keluarga miskin, dan mengidentifikasi permasalahan masyarakat setempat. Bersama-sama, FKW Kamal Muara dan Jaringan Perempuan Kamal Muara telah menyusun program perencanaan, mengidentifikasi masalah-masalah spesifik mereka, dan mendiskusikan bagaimana mengatasi

permasalahan tersebut. Pendekatan partisipatif diterapkan dalam semua kegiatan Forum.

FKW Kamal Muara dan Jaringan Perempuan Kamal Muara masih dalam tahap awal pengembangan organisasi. Sekalipun demikian, Forum telah mendukung pelaksanaan program padat karya Departemen Pertanian dan telah membantu mengatasi masalah distribusi beras program padat karya ADRA (The Adventist Development and Relief Agency). Berkaitan dengan upaya pemberdayaan masyarakat, Jaringan Perempuan Kamal Muara masih menunggu jawaban proposal program pengadaan air bersih yang diajukan kepada badan pemberi dana. Jaringan ini juga sudah memulai kegiatan penanaman tanaman produktif di dalam pot di tiap rumah, dan menyusun proposal program padat karya khusus untuk perempuan yang akan diajukan ke SIWU (Special Initiative for Women's Unemployment). Disamping itu, saat ini Jaringan Perempuan Muara Kamal bersama-sama dengan FKW Muara Kamal sedang melakukan pemantauan program beasiswa murid Sekolah Dasar.

Penutup

Seluruh aktivitas Forum tidak akan menjadi suatu karya nyata bila tidak didukung oleh pihak donor maupun karena kerjasama baik dengan berbagai LSM. Forum juga menyadari bahwa semua upaya adalah demi kemajuan masyarakat Kamal Muara. FKW Muara Kamal membuka tangan dan berharap ikatan kerja sama lebih lanjut dengan semua pihak.

PENGAMATAN CEPAT SMERU: PEMANTAUAN PROGRAM OPK

Session 5: Sri Kusumastuti Rahayu, SMERU

Pendahuluan

SMERU secara formal didirikan pada bulan Oktober 1998, tetapi sebetulnya SMERU telah melakukan pemantauan terhadap dampak krisis moneter (*krismon*) sejak bulan Agustus. Misi SMERU antara lain memantau dampak sosial krisis di Indonesia dan memberikan informasi akurat sedini mungkin kepada pihak yang berkepentingan (pemerintah, lembaga donor, LSM dan kelompok masyarakat). Berdasarkan mandatnya, maka Tim Pemantau Dampak Krisis (Crisis Impact Team) SMERU melakukan pemantauan melalui pemantauan cepat (*rapid appraisals*) mengenai hal-hal penting yang harus segera diperhatikan. Pemantauan cepat ini adalah pengamatan kualitatif yang dilakukan tidak lebih dari dua bulan, termasuk kegiatan pemantauan di lapangan, analisa dan penyusunan laporan.

Tim Dampak Krisis SMERU terdiri dari 8 peneliti senior. Mengingat keterbatasan sumberdaya staff dan persyaratan bahwa kegiatan harus dilakukan dalam waktu singkat, maka sebagian besar pengamatan kualitatif cepat SMERU hanya menjangkau sejumlah wilayah terbatas, yaitu tiga hingga empat wilayah dalam sekali pengamatan. Namun demikian, diyakini bahwa apa yang ditangkap dari lapangan mewakili keadaan nyata di lapangan, dan dapat melengkapi kajian-kajian lain yang bersifat kuantitatif, walaupun tidak selalu mewakili seluruh propinsi negara ini.

Permasalahan yang diamati sesuai dengan mandat SMERU adalah permasalahan sosial seperti masalah pangan, ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan, serta pelaksanaan program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Selama konperensi SMERU ini Tim Dampak Krisis ingin berbagi pengalaman lapangan, yaitu tentang pendekatan yang digunakan dalam menggali informasi baik selama persiapan lapangan dan selama di lapangan, maupun upaya penyampaian hasil temuan sebagai upaya tanggapan dini. Pengamatan cepat SMERU tentang pelaksanaan Operasi Pasar Khusus (OPK) hanyalah salah satu contoh dari beberapa kegiatan pengamatan cepat yang telah dilakukan.

Pengamatan yang telah dilakukan

Pengamatan cepat SMERU yang pertama adalah salah satu dari isu yang paling hangat pada tahun 1998, yaitu meningkatnya harga beras yang sangat luar biasa pada bulan Juli-Agustus 1998. Saat itu tidak ada informasi yang pasti – apakah stock beras memang tidak ada atau beras ditimbun, atau terdapat masalah lain. Tim SMERU melakukan pengamatan cepat di seluruh pulau Jawa pada pertengahan Agustus 1998. Ternyata diketahui bahwa salah satu penyebab penting adalah berhentinya transaksi pedagang besar dan kegiatan bongkar muat – dimulai di Surabaya kemudian di Semarang- selama

beberapa hari karena issue akan ada kerusuhan pada hari ulangtahun kemerdekaan RI. Penyebab lainnya adalah trauma yang dialami karena adanya pembajakan pengangkutan beras antar wilayah dalam jumlah besar.

Hingga akhir Nopember 1998, Tim Dampak Krisis telah melakukan pengamatan cepat terhadap paling tidak enam permasalahan, yaitu:

- Pelaksanaan program penjualan beras murah (Operasi Pasar Khusus)
- Persiapan pelaksanaan program PDM-DKE
- Dampak krisis terhadap pengangguran/tenaga kerja dari industri sepatu, tekstil, automotif, dan konstruksi/real estat
- Pengamatan cepat di DKI Jakarta mengenai dampak krisis terhadap kriminal, prostitusi, dan perilaku rumah tangga dalam berbelanja bahan pangan
- Dampak krisis terhadap penggunaan dan efektivitas Puskesmas, Posyandu, dan peran Bidan Desa
- Permasalahan pendidikan dan Program JPS

Selama pengamatan cepat tersebut diatas Tim SMERU telah mengunjungi lebih dari 150 desa/kelurahan, 76 kecamatan, 48 kabupaten, dan 13 propinsi di Indonesia.

Metodologi

Metodologi yang diterapkan oleh Tim Dampak Krisis SMERU adalah menggali informasi secara kualitatif melalui wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman pertanyaan. Pada dua studi terakhir juga digunakan pendekatan *Focus Group Discussion (FGD)* terhadap kelompok-kelompok tertentu, misalnya kelompok ibu balita, kelompok murid SLTP, kelompok istri pekerja industri ter-PHK, dan lain-lain.

Sebagai persiapan lapangan, Tim mempelajari terlebih dahulu data kuantitatif, studi-studi terdahulu, informasi dan Juklak program JPS yang terkait secara mendalam, berkonsultasi dengan berbagai pihak yang terkait seperti instansi/aparat pemerintah terkait, para ahli, dan peneliti yang telah melakukan studi serupa.

Informan lainnya termasuk tokoh masyarakat, termasuk Ketua RT/RW, aparat desa, aparat tingkat kecamatan dan kabupaten, LSM setempat (bila ada), dan petugas PLKB. Tim juga sering menggali informasi dari anggota masyarakat lain seperti pemilik warung (penjual rokok, bahan pangan, dll), PKK, kelompok arisan, sopir angkutan, dan tukang ojek.

Pada permasalahan khusus yang diamati, selain para informan tersebut diatas, informasi digali dari berbagai nara sumber. Sebagai contoh, pada pengamatan terhadap permasalahan kesehatan, selain masyarakat pemegang Kartu Sehat, Tim juga menemui anggota keluarga pemegang KS, masyarakat bukan pemegang KS, pengunjung Puskesmas, dokter Puskesmas, staf Puskesmas, Bidan Desa, Kader Posyandu, pemilik warung (obat), pengobat alternatif, dan dukun beranak.

Dasar pemilihan wilayah pengamatan antara lain: (1) wilayah yang terkena dampak krisis (biasanya menggunakan dasar Survei Kecamatan yang dilakukan oleh SMERU); (2) wilayah di luar pengamatan studi organisasi lain terhadap permasalahan serupa - wilayah ini biasanya tidak diikuti-sertakan; (3) perimbangan antara Jawa, luar Jawa, dan wilayah Indonesia Timur dan Barat; (4) termasuk dalam alokasi JPS; (5) data BKKBN dan data sekunder instansi pemerintah terkait; (6) hasil konsultasi para ahli; dan (7) wilayah yang belum pernah dikunjungi Tim SMERU sebelumnya.

Temuan resmi dituangkan dalam laporan. Draft laporan kemudian mendapat tanggapan dari pihak yang terkait dan berminat. Berdasarkan draft laporan tersebut juga dilakukan presentasi di hadapan instansi pengelola program. Laporan akhir tersedia bagi semua pihak yang berminat. Laporan akhir ini juga disimpan dalam Website SMERU (www.smeru.or.id).

Pengamatan Cepat SMERU: Pelaksanaan Program Operasi Pasar Khusus

Pengamatan Cepat SMERU terhadap pelaksanaan program Operasi Pasar Khusus (OPK) dilaksanakan pada bulan Oktober - Nopember 1998. Masyarakat di wilayah Jakarta telah menerima beras subsidi seharga Rp. 1.000,- per kg sebanyak 10 kg per KK per bulan selama empat bulan, sedangkan di wilayah lain selama dua 2 bulan.

Pengamatan dilakukan di 5 (lima) propinsi yaitu DKI Jakarta (Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur), Jawa Tengah (Semarang dan Magelang), Sulawesi Tengah (Donggala dan Poso), Maluku (Ambon), dan Sumatera Selatan (Muara Enim dan Ogan Komering Ilir), dan bertujuan untuk mendapatkan jawaban atas lima (5) pertanyaan utama, yaitu:

1. Apakah program OPK mencapai sasaran/target dengan tepat ?
2. Apakah administrasi OPK berjalan dengan lancar ?
3. Apakah program OPK mengalami kebocoran, disalahgunakan, atau ada permasalahan sejenis ?
4. Apakah penyebaran informasi OPK efektif ?
5. Apakah kualitas beras OPK bisa diterima oleh target ?

Perlu dicatat bahwa mengingat temuan ini telah berumur setahun, maka kenyataan di lapangan akhir-akhir ini mungkin sudah tidak sesuai dengan penemuan Tim SMERU pada saat itu.

Berdasarkan pengamatan, SMERU memperoleh jawaban yang diperoleh dari lapangan sebagai berikut:

- OPK dapat mencapai mereka yang memerlukan, tetapi tidak semua orang yang memerlukan mendapatkan OPK;
- Di beberapa wilayah, mekanisme pendistribusian dan pembayaran beras OPK berjalan dengan baik, tetapi umumnya pemerintah daerah (Pemda) dan aparat pelaksanaannya perlu diberi biaya operasional dan petunjuk yang lebih memadai;
- Keharusan melakukan pembayaran langsung pada saat menerima beras (*cash and carry*) cukup membebani target;

- Mekanisme pembayaran dari Pemda ke Dolog bervariasi dari satu daerah ke daerah lainnya;
- Tidak ada informasi yang berkaitan dengan beras dijual kembali, dikorupsi atau dijual disalahgunakan; meskipun demikian Tim SMERU mengidentifikasi beberapa peluang kebocoran yang masih memerlukan studi lebih lanjut yang berkenaan dengan biaya operasional, penundaan pembayaran beras OPK antara titik pengumpulan dan kantor Dolog, serta penimbangan beras di titik pembagian dan di gudang;
- Penyebaran informasi OPK tidak akurat dan tidak efektif;
- Beras OPK merupakan beras kualitas rendah dan medium. Secara umum, target dapat menerima beras tersebut, kecuali di satu tempat penelitian di Semarang dimana target merasa kurang puas karena kualitas beras yang diterima sangat rendah;

Berdasarkan temuan pada saat itu, SMERU menyarankan beberapa hal antara lain:

1. Informasi tentang OPK disampaikan secara terperinci dan sistematis dengan menekankan pada tujuan dan jangka waktu program serta memungkinkan masyarakat untuk melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan OPK di tingkat kelurahan/desa;
2. Tersedia dukungan dana operasional yang konsisten dari Pusat untuk pelaksanaan lapangan, termasuk petunjuk yang jelas yang secara eksplisit memungkinkan aparat Pemda dapat melakukan penyesuaian dengan kondisi daerah masing-masing;
3. Tersedia anggaran yang berimbang dan lebih transparan, termasuk petunjuk tentang bagaimana 'anggaran biaya operasional' yang besarnya Rp. 95/kg dibagikan diantara para pelaksana yang terlibat dalam penyaluran beras OPK di berbagai tahap.
4. Peningkatan biaya operasional dengan memasukkan sedikit biaya untuk memfasilitasi pemantauan oleh masyarakat (seperti biaya transport masyarakat ke tempat penyaluran/penimbangan);
5. Menyempurnakan petunjuk pelaksanaan (Juklak) program, dengan mempertimbangkan beberapa alternatif, antara lain:
 - Memperbaiki kriteria dasar dari target penerima, termasuk kriteria baru:
 - 1) Keluarga yang mengkonsumsi protein hanya seminggu sekali
 - 2) Keluarga dengan anak-anak yang tidak bersekolah, dan
 - 3) Keluarga dengan kepala keluarga yang menganggur, atau mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK)
 - Menyempurnakan target penerima dengan memasukkan orangtua tunggal dan/atau individu yang tinggal dalam satu rumah (misalnya para buruh), serta mereka yang tidak memiliki KTP sah;
 - Menambah alokasi bulanan menjadi 20 kilogram, dengan catatan pembayarannya dilakukan secara bertahap (misalnya seminggu sekali);
 - Sistem pemilihan target berdasarkan muatan lokal.

Tindak Lanjut Hasil Temuan

Ketika Tim telah kembali dari lapangan, maka temuan yang dinilai sangat penting dan perlu ditindak lanjuti, segera disampaikan kepada pihak berwenang terkait (melalui surat,

e-mail), termasuk pengelola program, sebagai bagian dari tanggapan dini. Namun demikian, karena beberapa kendala, seringkali hal ini tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana. Upaya ini akan terus ditingkatkan di masa mendatang.

Berdasarkan hasil temuan awal tersebut dan sebagai upaya tanggapan dini, Tim SMERU menyampaikan temuannya dan memberikan masukan kepada Kantor Meneg Pangan sebagai koordinator pelaksana program OPK. Kantor Meneg Pangan sangat terbuka menerima kritik dan masukan dan beberapa temuan SMERU diakui telah sangat berguna dalam pengambilan keputusan. Sejak itu, SMERU senantiasa dilibatkan dalam berbagai diskusi berkaitan dengan program OPK termasuk dalam desain perbaikan program.

Guna memberikan masukan yang lebih nyata (berdasarkan pengalaman lapangan) kepada pengelola program OPK, SMERU menyelenggarakan pertemuan antara pihak pengelola program OPK (Kantor Menteri Negara Pangan), konsultan USAID (dalam rangka perbaikan program OPK), dan para NGO yang selama ini telah aktif menyampaikan bantuan pangan kepada masyarakat.

Penutup

Berdasarkan pengalaman dimaksud, Tim SMERU yakin bahwa pemantauan perlu dilakukan secara terus-menerus. Untuk memenuhi komitmennya dalam melakukan pemantauan terhadap dampak krisis dan pelaksanaan JPS, pada saat Tim SMERU mengadakan pengamatan di lapangan untuk permasalahan lain, Tim SMERU selalu menggali informasi tentang berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan krisis. Misalnya, ketika sedang melakukan pengamatan cepat mengenai pendidikan dan kesehatan Tim SMERU juga mencermati program OPK dan program-program lainnya yang telah dikaji.

Temuan lapangan kemudian segera disampaikan kepada pihak yang terkait. Upaya seperti ini dinilai sangat efektif. Hasil pengamatan lapangan terakhir disampaikan dan didiskusikan langsung dengan pihak yang bersangkutan sehingga dapat segera dimanfaatkan.

**DAFTAR PESERTA
KONFERENSI SMERU
“MONITORING THE SOCIAL IMPACT OF THE CRISIS “
SELASA, 7 DESEMBER 1999
HOTEL MILLENNIUM – JAKARTA**

No.	NAMA	INSTITUSI & ALAMAT	TELEPON
01	Aris Ananta	LPEM-Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta	021-3143177
02	Anton Gunawan	LPEM-Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta	021-3143177
03	William Kwan	Padi Kasih , Jl. Abd. Muis No. 62 Jakarta Pusat	021-7396108
04	Budi Santoso	UPC, Billy Moon Blok. H-1/7 Jakarta	021-8642915 021-7404147
05	Erfan Maryono	LP3S, Jl. S. Parman 81, Jakarta	021-5663527
06	Bambang Setiabudhi	CARE, Jl. Kemang Utara No. 43 Jakarta Selatan	021-71790479
07	Tini Hadad Christina Pridy S. Andys	YLKI, Jl. Pancoran Barat VII/1 Duren Tiga Jakarta 12760	021-7971378 021-7981038
08	Burhanuddin	Yayasan Muara Indonesia, Jakarta	
09	Buyung	SAWARUNG, Bandung	022-4235526
10	Medelina	CSIS, Jl. Tanah Abang III/23-27 Jakarta	021-3865532
11	Suster Magda Suster Ella	PERDAKI, Jl. Kramat 6 no. 7 Jakarta	021-3909245
12	Deddy K	AKPPI, Jl. Maleer V/311, Bandung	
13	Riza P Casianto Sri Wahyuni	Bina Swadaya, Jl. Gunung Sahari III/7 Jakarta Pusat	021-4204402

14	Irfan Mustari Nur Fatoni Junaidi Pipin Sofiah	Forum Komunikasi Warga Kamal Muara, Kamal Muara Penjaringan, Jakarta	
15	Lea Jellinek	Researcher	
16	Bambang Rustanto	Researcher	
17	Amiruddin Syam Halida	Puslit Sosek Litbang Departemen Pertanian, Jl. A Yani 70, Bogor	0251-325177
18	Warih Tjahjono	Puskesmas, Jl. Salihara, Jakarta	
19	Wilson	CPIS, Jl. Martapura 16, Jakarta	
20	R. Yando Zakaria	JARI Indonesia, Jl. Bromo 2, Jakarta	021-3903963
21	Farida Rianti	Bina Sumber Daya Mitra, Jl. Kompleks Gudang Peluru, Blok M/292 Tebet, Jakarta Selatan	021-9101691
22	Dr. Jacqueline L. Pomeroy	World Bank RSI, Jakarta	021-52993000
23	Benjamin Fisher	World Bank RSI, Jakarta	021-52993000
24	Isono Sadako	World Bank RSI, Jakarta	021-52993000
25	Mohammad Rum Ali	USAID, Jl Medan Merdeka Selatan 3-5 Jakarta	021-3442211
26	Yuliawati	AusAID, Jl Rasuna Said Kav. 15-16 Jakarta	021-25505555
27	Rani. Noorhadhie	AusAID, Jl. Rasuna Said Kav. 15-16 Jakarta	021-25505555
28	Karin Oswald	GTZ SFDM, Gedung Depdagri , Jl. Veteran No. 7 Lt. 2 Sayap Barat Room. 204 Jakarta Pusat	021-3868166
29	Hans Antlov	FORD FOUNDATION, S. Widjojo Centre Jl. Sudirman 71 Jakarta.	021-2524073-78
30	Dr. Shafiq Dhanani	UNDP, Jl. M. H. Thamrin No. 14 Jakarta	021-3902543-4
31	Dasril	Departemen Keuangan, Lt. 5 Gd. Utama, Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4 Jakarta Pusat 10710	021-3852476/7
32	W. H Hutagalung	Departemen Keuangan, Lt. 5 Gd. Utama Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4 Jakarta Pusat 10710	021-3852476/7
33	Laura Bailey	World Bank/SMERU, Jakarta	021-3909363
34	Maman Hidayat	ASPEN, Jl. Rebana 32, Jakarta	
35	Reza Siregar	LPEM-FEUI, Jl. Salemba Raya Jakarta 10430	021-3143177

36	Wahida	PSE Pusat , Jl. Ahmad Yani No. 70 Bogor	0251-325177
37	Evy Dadang Solihin Dede Wardianto Dil Sastra	Sekretariat UPM PDM-DKE , Jl. Sumbing No. 46 Menteng, Jakarta Pusat	021-8303846
38	Tajuddin N. Effendi	CIMU , Gedung Depdikbud Gedung E Lt. 2 Jakarta	021-5739919
39	Smith Rob Erskine	AF-SPL , Jakarta	021-7804157
40	Ayat Sutanyat	DASA WARGI , Jl. Kebun Kembang 17, Bandung	
41	Maman	Forum Warga Kelurahan Cibangkong, Bandung	022-318126
42	Trevor Buising	AF-SPL , Jakarta	021-7804157

**DAFTAR PEMBICARA
KONFERENSI SMERU
“MONITORING THE SOCIAL IMPACT OF THE CRISIS “
SELASA, 7 DESEMBER 1999
HOTEL MILLENNIUM – JAKARTA**

No.	NAMA	INSTITUSI & ALAMAT	TELEPON
1.	Kamala Chandrakirana	JARI Indonesia , Jl. Bromo 2, Jakarta	021-3903963
2.	Roy Tjiong	Hellen Keller International , Jl. Patra Kuningan 14/12, Jakarta	021-5263872
3.	Medelina Henditiyo	CSIS , Jl. Tanah Abang III/23-27 Jakarta	021-3865532
4.	Alex Irwan	SMERU , Jl. Subang 22, Menteng, Jakarta 10310	021-3909363
5.	Andarusman	Forum Warga Kelurahan Cibangkong , Bandung	022-318126
6.	Nurwahida	Forum Komunikasi Warga Kamal Muara , Kamal Muara Penjaringan, Jakarta	
7.	Sri Kusumastuti Rahayu	SMERU , Jl. Subang 22, Menteng, Jakarta 10310	021-3909363